

Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020

Wasi Nuroso Rian Hidayat^{1*} dan Winny Perwithosuci²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura.

*e-mail: wnrianhidayat212@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

1 February 2024

Revised :

31 March 2024

Accepted :

6 April 2024

Kata Kunci :

IPM, PDRB Perkapita, Upah Minimum, Tenaga Kerja, Penduduk Miskin.

Keywords :

HDI, GRDP, Minimum Wage, Labor, Poor Population.

IPM merupakan salah satu faktor penentu tercerminnya kehidupan yang layak. IPM menjadikan salah satu kunci dimana pertumbuhan ekonomi meningkat dengan sejalanannya kualitas sumber daya manusia yang ada di negara. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki nilai IPM yang cukup tinggi tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga kerja, Jumlah Penduduk Miskin terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Cross Section 27 Kabupaten di Provinsi Jawa barat tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengolah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat dijelaskan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* atau (FEM). Hasil estimasi menunjukkan PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap IPM, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap IPM. Upah minimum berpengaruh berpengaruh positif terhadap IPM. Penyerapan Tenaga kerja tidak berpengaruh positif terhadap IPM, Jumlah penduduk Miskin tidak berpengaruh positif terhadap IPM.

Analysis of the Influence of Per Capita GRDP, Minimum Wages, Labor Absorption, Number of Poor Population on the Human Development Index in West Java Province 2017-2020

ABSTRACT

HDI is one of the determining factors reflecting a decent life. HDI makes one of the Keys where economic growth increases with the quality of human resources in the country. West Java province is one of the provinces that has a fairly high HDI value each year. This study aims to determine the effect, GDP per capita, minimum wage employment, the number of poor people on Human Development Index (HDI) in West Java province. This study is a quantitative research and the data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency, the analysis used is a panel data regression in the form of Cross Section 27 districts in West Java

province in 2017-2020 . Based on the results of panel data regression analysis can be explained that the selected model is a Fixed Effect Model or (FEM). The results of the GDP model estimation have a positive effect on HDI, the workforce has a positive effect on HDI. Minimum wage has a positive effect on HDI. Labor has no positive effect on HDI, the number of poor people has no positive effect on HDI. Test F with prob 0.0000 and R-square of 0.9968 or 99.68%.

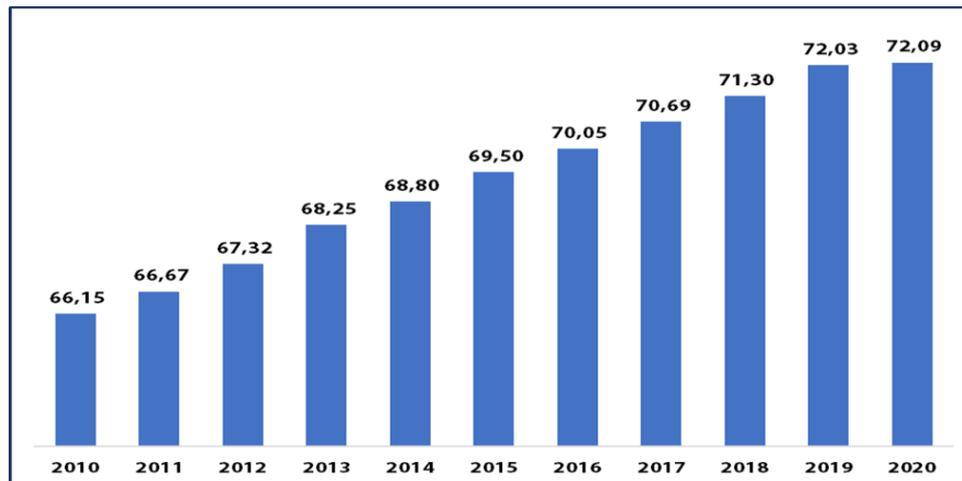
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi (Bannock, 2004).

Keberhasilannya dapat diukur melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM bertujuan untuk membantu keberhasilan pembangunan dengan cara memprioritaskan manusia sebagai parameter yang digunakan untuk menilai kemajuan negara yang menggambarkan baik ekonomi maupun sosial. IPM telah disepakati dunia melalui konferensi PBB (Persatuan Bangsa- Bangsa) yang kemudian melahirkan UNDP (*United Nation Development Program*). Dimana untuk menjadi negara maju, suatu negara tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi saja namun juga memperhatikan pembangunan manusia yang menyeluruh (Todaro M.P , 2006).

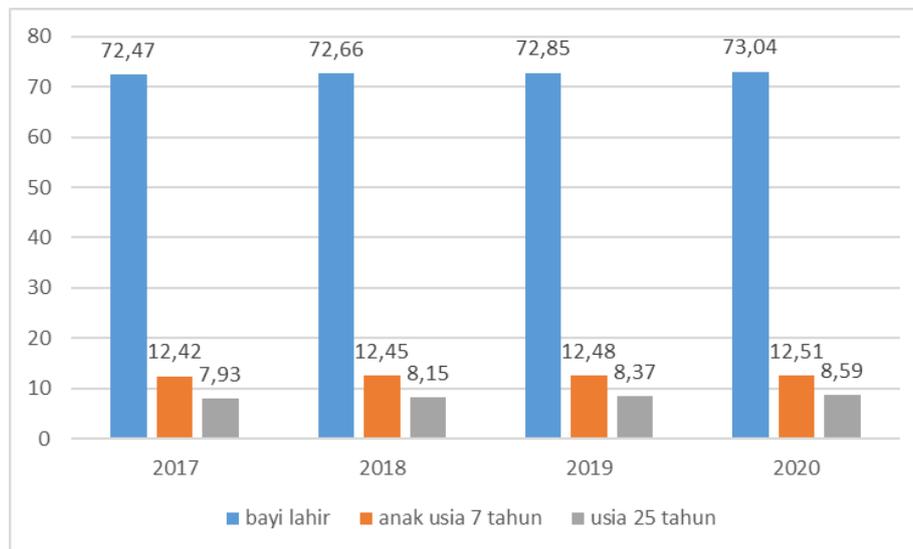
Faktor yang dianggap penting dalam peningkatan IPM adalah dari segi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu hal yang menggambarkan kualitas hidup manusia sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prioritas pembangunan di suatu negara.

Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 terdapat kenaikan yang menonjol. IPM Jawa Barat menjadi peringkat ke-10 secara nasional dibawah DKI, DIY, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten dan Sumatera Barat. Jawa Barat terdapat 27 kabupaten/kota ada 13 yang memiliki status tinggi dan ada 11 lainnya yang masih berstatus sedang. Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,4 % sehingga provinsi tersebut menempati peringkat ke-10 secara nasional, dengan pertumbuhan IPM dengan status tinggi. Peningkatan IPM merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen berbentuk IPM seperti, setiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup dari 72,47 tahun pada 2017 dan 73,04 tahun pada 2020 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,19 pertahun. Anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah 12,42 tahun pada 2017 dan 12,51 tahun pada 2020 ada peningkatan 0,03 per tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 7,93 tahun pada 2017 dan 8,59 tahun pada 2020 adanya peningkatan 0,22 per tahunnya.



Sumber : BPS, Jawa Barat, 2023.

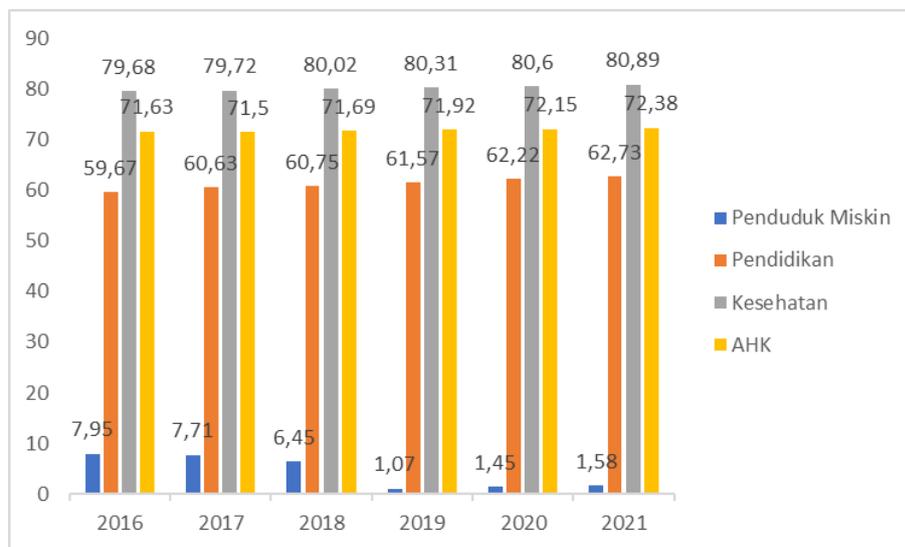
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat 2010-2020



Sumber: BPS Jawa Barat, 2023.

Gambar 2. Data Rata- Rata Peluang Bersekolah Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020

Gambar 2. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam tiga komponen penentu IPM yang ditunjukkan dari data bayi lahir, anak berusia 7 tahun, anak berusia 25 tahun yang mempunyai peluang untuk bersekolah. Penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan IPM yang ada di Jawa Barat pada periode 2017-2020. Adanya kesenjangan capaian IPM dan komponen-komponen IPM antar kota /kabupaten inilah yang menjadi permasalahan. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), digunakan sebagai indikasi pengukuran tingkat kesehatan Jawa Barat tahun 2017 mencapai 72,47 tahun, artinya rata-rata bayi yang lahir akan hidup selama 72,47 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan sebagai indikator pengukuran dimensi pendidikan diukur dengan indikator. Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun digunakan sebagai indikator pengukuran komponen Standar Hidup Layak dalam satuan rupiah yang distandarkan dengan paritas daya beli.



Gambar 3. Data Persentase penduduk miskin, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Gambar 3. menjelaskan bahwa data tersebut berfluktuasi dan terdapat perubahan setiap tahunnya. Namun dalam gambar tersebut angka harapan hidup terdapat penurunan pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun tersebut terdapat penurunan perekonomian yang disebabkan oleh covid-19. Provinsi Jawa Barat termasuk dalam 10 besar IPM tertinggi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Namun walaupun provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori tersebut masih terdapat penurunan pada angka harapan hidup di daerah-daerah yang tertinggal seperti kabupaten Cianjur sebesar 62,92. Kabupaten Cianjur menjadi salah satu kabupaten dengan nilai IPM terendah dikarenakan faktor pendidikan yang masyarakatnya lebih dominan hanya menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) atau tidak bersekolah sama sekali. Hal ini menjadikan IPM di daerah tersebut menjadi terendah sehingga provinsi Jawa Barat walaupun IPMnya menjadi 10 yang tertinggi namun terdapat beberapa daerah yang belum memadai faktor-faktor peningkat IPM.

Muliza, dkk, (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. Metode yang dipakai adalah Regresi Data Panel, dengan model yang terpilih REM. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan menurut penelitian Naibaho dkk (2021), dengan metode kuantitatif yang menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif Koefisien Regresi PDRB (X1) adalah sebesar -2,382 menunjukkan bahwa ketika PDRB naik sebesar 1% maka IPM akan menurun sebesar 2,38% dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan.

Koefisien regresi negatif maka hal ini semakin besar nilai PDRB maka IPM akan semakin menurun. Disini PDRB memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM. Namun, dalam penelitian ini PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya

output perkapita (Todaro, 2006). Dalam hal ini pertumbuhan output yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Tingginya pertumbuhan output akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat dan dalam hal ini akan meningkatkan tingkat daya beli. Tingginya tingkat daya beli di masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam pembentukan IPM yang dilihat dari segi pendapatan. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Chalid, dkk, (2014), meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, Dan Laju Pertumbuhan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Riau”. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif diperoleh hasil tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum, dan laju pertumbuhan berpengaruh terhadap IPM di provinsi Riau. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia masing-masing sebesar $-0,163$ dan $-0,084$. Upah minimum dan laju pertumbuhan berpengaruh positif terhadap IPM masing-masing $0,005$ dan $0,953$. Sedangkan menurut penelitian Citra I & Ignatia M (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DI Provinsi Jawa Tengah”. Variabel upah memiliki nilai signifikan sebesar $0,305 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Yang berarti bahwa setiap adanya peningkatan upah maka tingkat IPM akan menurun Provinsi Jawa Tengah. Namun, dalam penelitian ini variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan teori David Ricardo dalam Teori Upah Wajar (alami), tingkat upah digunakan sebagai balas jasa bagi tenaga kerja merupakan harga yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan para tenaga kerja. Ricardo juga menyatakan bahwa perbaikan upah hanya ditentukan oleh perbuatan dan perilaku tenaga kerja dan pembentukan upah sebaiknya diserahkan kepada persaingan pasar bebas. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar dimana upah yang terjadi di pasar dan oleh permintaan dan penawaran upah harga berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh para ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan sebagai batas minimum dari upah kerja.

Menurut Todaro, (2003), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semuanya sepenuhnya tergantung dari kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal serta tersedianya input dan faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Izzah C. I & Hendarti I. M., (2021), meneliti tentang “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Tengah”. Menggunakan metode OLS. Variabel tenaga kerja memiliki nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Yang berarti bahwa setiap adanya peningkatan tenaga kerja maka akan menaikkan IPM

Provinsi Jawa Tengah. Tingkat Pendidikan yang semakin meningkat berdampak pada pengetahuan Masyarakat dan keahlian masyarakat yang meningkat sehingga meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan menghasilkan tenaga kerja dengan kualitas yang bagus dan akan memperoleh hasil produksi yang semakin banyak. Produksi dengan memperoleh hasil yang lebih banyak maka pendapatan yang diterima akan menjadi lebih besar dan konsumsi yang juga meningkat. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Mulyadi, 2003). Artinya, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan memberikan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan dalam penelitian Faellassuffa A & Yuliani E, (2021). Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia. Pengaruh tersebut sebesar -0.108 , menunjukkan bahwa arah pengaruhnya negatif. Hal ini berarti kenaikan sebanyak 1% pada tingkat partisipasi angkatan kerja akan membuat turun indeks pembangunan manusia sebesar 0,108 persen. Kemudian pada hubungan antar variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan tingkat penduduk miskin. Maka pada studi kasus ini jika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat akan diikuti peningkatan penduduk miskin. Hal inilah yang mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia yang menjadikan turun. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan teori Menurut Todaro, (2003), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semuanya sepenuhnya tergantung dari kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal serta tersedianya input dan faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Jasasila, (2020), melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011-2019. Metode yang dipakai adalah Regresi Data Panel. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa Kemiskinan berpengaruh walaupun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batang Hari selama 2011-2019. Dari persamaan diketahui variabel kemiskinan menunjukkan koefisien sebesar 0.03 artinya jika terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan IPM sebesar 0,03% dengan asumsi Variabel Jumlah Penduduk adalah 0, berarti setiap peningkatan Kemiskinan akan meningkatkan persentase IPM di Kabupaten Batang Hari. Sedangkan dalam penelitian Umiyati, dkk, (2017) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin dengan nilai probabilitas 0.0318, ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai IPM. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk miskin sebesar 4.752403, artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1 % maka akan menurunkan nilai IPM sebesar 4,752%. Namun, dalam penelitian ini penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap IPM. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup di bawah kemiskinan Internasional. (Todaro dan Smith, 2006). Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan

manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam, dimana perkembangan sumber daya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah Minimum, Penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur dari periode 2017- 2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Sementara itu, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB perkapita (Miliar Rupiah), upah minimum (Juta Rupiah), penyerapan tenaga kerja (%) dan Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa) pada 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020. Sehingga jenis data yang digunakan adalah data panel. Menurut Gujarati (2012), data panel merupakan gabungan data time series dan data cross section. Data panel mampu menambah data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita, upah minimum, penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2020. Menurut Gujarati (2012), data panel merupakan gabungan data time series dan data cross section. Tahapan data panel terdapat regresi CEM, FEM, REM, pemilihan model terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman, Uji validitas pengaruh yaitu Uji t, Uji F, R-Square.

Model Ekonometrika pada penelitian mengacu pada penelitian Moh. Faizin, (2019), yang menggunakan variabel independen yaitu pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel independen. Model ekonometrika ini sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 JPM_{it} + C_{it}$$

Keterangan:

<i>IPM</i>	: Indeks Pembangunan Manusia (%)
<i>PDRB</i>	: Produk Domestik Regional Bruto (Miliar)
<i>UM</i>	: Upah Minimum (Rupiah)
<i>TK</i>	: Tenaga Kerja (Ribuan Jiwa)
<i>JPM</i>	: Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi Variabel Independen
Log	: Operator logaritma berbasis <i>e</i>
<i>C_{it}</i>	: Error Term (Faktor Kesalahan)
<i>i</i>	: Provinsi Ke <i>i</i>
<i>t</i>	: Tahun Ke <i>i</i>

Tahapan estimasi model ekonometrika meliputi: Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS), Metode Fixed Effect (FEM), Metode Random Effect (REM), Uji Chow, Uji Hausman, Uji χ^2 , Uji F, R-Square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data panel dengan kombinasi Time series sejumlah 4 tahun dengan cross section sebanyak 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Time series yang digunakan lebih besar dari cross section maka dari itu menurut Gujarati, (2012), data panel merupakan gabungan data time series dan data cross section. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variable. Hasil analisis data panel ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel CEM, FEM, REM

Variabel	CEM	FEM	REM
C	7.386958 (0,6486)	-183.7776 (0,0000)	-88.64474 (0,0000)
Log (PDRB)	3.643854 (0,0000)	14.62519 (0,0000)	9.405008 (0,0000)
Log (Upah Minimum)	1.601367 (0,0157)	0.132213 (0,0446)	0.142841 (0,0294)
TK	-0.174120 (0,0738)	0.023185 (0,2165)	0.047213 (0,0097)
Log (Penduduk Miskin)	-2.279490 (0,0000)	0.615051 (0,2766)	-1.126661 (0,0087)
R-squared	0,4444	0,9968	0,6563
Prob (F-statistic)	0,0000	0,0000	0,0000

Sumber: Data Yang Diolah Eviews 10, 2023.

Pada Tabel 1. menjelaskan bahwa dalam model data panel terdapat tahapan dalam pemilihan model terbaik yaitu dengan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM.

Tabel 2. Hasil Pengolahan Uji Chow

Effects Test	Prob.
Cross-section F	0,0000
Cross-section Chi-square	0,0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 10, 2023.

Pada tabel 2 merupakan hasil uji chow yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section Chi-square sebesar 0,0000 sehingga dapat diartikan dengan kurang dari alfa (0,05), sehingga dalam uji chow model yang terpilih adalah FEM. Selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik dengan FEM dan REM.

Tabel 3. Hasil Pengolahan Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0,0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023.

Pada Tabel 3 merupakan hasil uji hausman yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section Random sebesar 0,0000 sehingga dapat diartikan dengan kurang dari alfa (0,05), sehingga dalam uji hausman model yang terpilih adalah FEM.

Tabel 4. Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	Prob.
C	-183,7776	0,0000
LOG(PDRB	14,62519	0,0000
LOG(UPAH MINIMUM)	0,132213	0,0446
TK	0,023185	0,2165
LOG(PENDUDUK MISKIN	0,615051	0,2766
Prob.	0,000000	
R-Square	0,996799	

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2023.

Hasil estimasi tabel 4 pada regresi data panel menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Upah Minimum signifikan terhadap IPM dengan probabilitas sebesar 0,0000 dan 0,0446. Namun variabel Tenaga Kerja dan Penduduk Miskin tidak signifikan terhadap IPM dengan probabilitas sebesar 0,2165 dan 0,2766. Uji F merupakan uji untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen sebesar 0,0000 artinya variabel PDRB, Upah Minimum, Tenaga Kerja, Penduduk Miskin secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM dan R-square sebesar 0,9968 atau 99,68% terhadap IPM.

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan model FEM karena dalam pengujian model terbaik dengan Uji Chow sebesar 0,0000 dan Uji Hausman sebesar 0,0000 sehingga menunjukkan bahwa probabilitas kurang dari alfa 0,05 sehingga model yang terpilih dalam regresi data panel adalah FEM.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 ($<0,05$) dan koefisien 14,6252. Hal ini berarti ketika PDRB Perkapita naik 1 milyar rupiah maka IPM naik sebesar 14.6252%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Citra I & Ignatia M (2021) yang melakukan penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia dengan metode regresi linier berganda di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 yang menjelaskan variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan probabilitas sebesar 0,002. Tingginya pertumbuhan output akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat dan dalam hal ini akan meningkatkan tingkat daya beli. Tingginya tingkat daya beli di masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam pembentukan IPM yang dilihat

dari segi pendapatan. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi sebesar 0,0446 ($<0,05$) dan koefisien 0,1322. Hal ini berarti ketika Upah Minimum naik 1 rupiah maka IPM naik sebesar 0,1322%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chalid, N. & Yusbar Y., (2014),. Melakukan penelitian mengenai Indeks Pembangunan manusia dengan metode regresi linier berganda di Provinsi Riau tahun 2006-2011 yang menjelaskan variabel Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan probabilitas sebesar 0,0000. Upah minimum memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan IPM dikarenakan ketika upah minimum naik maka karyawan akan memiliki kemampuan daya beli yang meningkat. Pekerja akan memiliki kemampuan untuk menyekolahkan dan memberikan fasilitas ataupun makanan yang memadai yang nantinya dapat menjadikan generasi yang berpendidikan dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi sebesar 0,2165 ($>0,10$) dan koefisien sebesar 0,0232. Hal ini berarti ketika penyerapan tenaga kerja naik 1 % rupiah maka IPM naik sebesar 0,0232%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faelassuffa A & Yuliani E (2021) melakukan penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia , dengan metode kualitatif di Indonesia tahun 2010-2015, Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia. Pengaruh tersebut sebesar -0.108, menunjukkan bahwa arah pengaruhnya negative. Hal ini berarti kenaikan sebanyak 1% pada tingkat partisipasi angkatan kerja akan membuat turun indeks pembangunan manusia sebesar 0,108 persen. Kemudian pada hubungan antar variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan tingkat penduduk miskin. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kesempatan kerja yang tinggi, dalam penelitian ini penyerapan tenaga kerja tidak begitu berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat dikarenakan faktor sumber tingginya kesempatan kerja yang dapat menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut. Penyerapan tenaga kerja dapat mempengaruhi IPM dikarenakan ketika penyerapan tenaga kerja semakin naik maka harapan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin memadai sehingga nantinya tenaga kerja akan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat dikatakan menjadi hidup layak.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi sebesar 0,2766 ($>0,10$) dan koefisien sebesar 0,6151. Hal ini berarti ketika penduduk miskin naik 1 ribu jiwa maka IPM naik sebesar 0,6151%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, dkk (2017) menunjukkan bahwa Variabel jumlah penduduk miskin dengan nilai probabilitas 0.0318, ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai IPM. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk miskin sebesar 4.752403, artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1% maka akan menurunkan nilai IPM sebesar 4,752%. Provinsi Jawa barat dalam regresi yang telah dipaparkan penduduk miskin berpengaruh positif yang artinya jika penduduk miskin naik maka akan menaikkan IPM. Namun dalam kasus ini penduduk miskin tidak terlalu banyak menjadikan IPM naik secara drastis. Penduduk miskin masih menjadi pengaruh yang besar terhadap IPM dikarenakan semakin meningkat penduduk miskin maka IPM akan turun dan dapat dikatakan bahwa Pendidikan, Kesehatan, hidup layak masih kurang diperhatikan. Pemerintah dapat memberikan edukasi yaitu dengan mendirikan Balai

Latihan Kerja (BLK) yang dapat digunakan untuk memberikan ilmu kepada masyarakat yang akan bekerja. Pemerintah berupaya dengan adanya penurunan penduduk miskin maka dapat dipastikan bahwa IPM yang ada di daerah tersebut meningkat dengan sejalannya Pendidikan, Kesehatan, hidup layak karena dalam penurunan penduduk miskin terdapat beberapa masyarakat yang telah mendapatkan pekerjaan. Selain itu tak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan bantuan seperti, BPJS, KIP, dan terbukanya peluang dalam pengambilan KUR terhadap penduduk miskin.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa hasil uji F dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya ada pengaruh positif signifikan dari variabel PDRB, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar $0,9968$. Artinya, ada pengaruh sebesar $99,68\%$ dari variabel independen PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ada di dalam model. Dan $0,32\%$ sisanya dipengaruhi dari variabel di luar model.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil hasil estimasi, pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Tenaga Kerja, Penduduk Miskin adalah positif. Variabel PDRB dan Upah Minimum berpengaruh terhadap IPM, namun variabel tenaga kerja dan penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap IPM. Variabel PDRB berpengaruh terhadap IPM dengan probabilitas sebesar $0,0000$, variabel upah minimum berpengaruh terhadap IPM sebesar $0,0446$, variabel Tenaga Kerja berpengaruh terhadap IPM sebesar $0,2165$, variabel Penduduk Miskin berpengaruh terhadap IPM sebesar $0,2766$. Uji F sebesar $0,0000$ artinya variabel PDRB Perkapita, Upah Minimum, Tenaga Kerja, Penduduk miskin secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM dengan R-Square sebesar $99,66\%$ yang artinya $99,66\%$ variabel di dalam model berpengaruh terhadap IPM. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM di Provinsi Jawa Barat menjadi peringkat ke 10 secara nasional dalam pertumbuhan indeks pembangunan ekonomi. Keberhasilannya dapat diukur melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM bertujuan untuk membantu keberhasilan pembangunan dengan cara memprioritaskan manusia sebagai parameter yang digunakan untuk menilai kemajuan negara yang menggambarkan baik ekonomi maupun sosial.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu komponen penentu pertumbuhan ekonomi dikarenakan jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang menjamin mempermudah mendapatkan pekerjaan sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kesehatan pendidikan dan hidup layak. Salah satu yang menjadi faktor pemicu yaitu Angka harapan hidup di Provinsi Jawa Barat yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian indikator pendidikan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari komponen rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dimana tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Perlu upaya pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memastikan anak miskin dapat bersekolah dengan pelembagaan peraturan daerah yang mengatur kepastian sumber dana pendidikan anak miskin berasal dari sebagian pendapatan provinsi yang diperoleh dari besarnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB; adanya dana (block grant) langsung diberikan kepada sekolah (otonomi di tingkat sekolah) dan menjadi bagian dari RAPBS.

Sebaiknya pemerintah lebih sering untuk survey ke wilayah-wilayah tertinggal supaya wilayah tersebut dapat diberikan fasilitas yang lebih baik seperti pemberian beasiswa,

pelayanan kesehatan maupun pemberian puskesmas bagi wilayah yang masih minim tempat untuk berobat, adanya sosialisasi pentingnya pendidikan supaya masyarakat termotivasi untuk bersekolah, pemberian wadah untuk mengasah kemampuan bagi masyarakat setempat yang nantinya dapat menumbuhkan pendapatan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in Southeast Asia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(2), 118–137. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i2.44>
- Bannock, Graham, R. E. baxter dan Evans Davis. (2004). *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books LTD.
- Cahyati, S. A., & Fevriera, S. (2002). The Effect of Regional Minimum Wage and Inflation on HDI in Central Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 113–122.
- Chalid, N dan Yusbar Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 22(2).
- Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2022). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19979>.
- Fajriah, N. A. (2021). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product, Number of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Human Development Index on Poverty in 2010-2020 East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i2.27778>.
- Gujarati, D.N., (2012), *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). *Ekonomi Dan Bisnis*, 9, No 1, 20–24.
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.155>
- Islamiatus Izzah, C., & Martha Hendarti, I. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, V, 99–106. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3392>.
- Izzah, I Citra dan Ignatia M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*. 5(2).
- Jasasila. (2020). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 11(1), hal: 40-44.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi The Effect Of Inflation , Gross Domestic Products And Regional Minimum Wage On Human Development Index Pengaruh Inflasi , Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Man. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 41–56.

- M. Faizin. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. 12 (2), 214-227.
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *Jejak*, 4(2), 102–113.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Muliza., Zulham, T., Seftarita,Chenny. (2017). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1).
- Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan.Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nuriyah, siti R., Muafiqie, H., & Junaedi, J. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Kemiskinan Terhadap Indeks pembangunan manusia di kabupaten bojonegoro. *Journal of Public Power*, 1(2), 97–109.
- Ramadani, & Muzdalifah. (2021). *Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2010-2018*. 4(2), 6.
- Sari, E., & Yusniar, R. (2019). Analisis Pengaruh City Branding Terhadap Ekonomi Pariwisata (Studi Kasus Gunung Tidar). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1427>
- Tarumingkeng, W. A., RUMATE, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 82–95. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19789.19.6.2018>
- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.22437/jssh.v1i1.376.s>